

Judul : Masinton Dituding Kerap Bergerak di Luar Kontrol
Tanggal : Jumat, 22 September 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 10

Masinton Dituding Kerap Bergerak di Luar Kontrol

Fraksi PDIP mencopot dia dari jabatan pemimpin Panitia Angket KPK.

Hussein Abri Dongoran
hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencopot Masinton Pasaribu dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi dan menggantinya dengan Eddy Kusuma Wijaya. "Ini untuk penyegaran," ujar Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, kemarin.

Bambang enggan merinci alasan fraksinya menukar Masinton. Pergantian Masinton itu tertulis dalam surat Fraksi PDIP yang diteken oleh Ketua Fraksi Utut Adianto dan Bambang pada 19 September lalu. Pergantian itu mulai efektif satu hari setelah Fraksi PDIP mengirim suratnya ke pemimpin Panitia Angket dan Sekretaris Jenderal DPR RI.

Namun sejumlah sumber *Tempo* di Fraksi PDIP menyebutkan, alasan penggantian Masinton adalah ia kerap bersikap kontroversial, terlalu tampil dalam Pansus, dan kerap menyerang KPK. Contohnya, pada Juni lalu Masinton mengatakan Ketua KPK berlebihan karena meminta Presiden Joko Widodo menolak hak



Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi (kanan) dan Masinton Pasaribu di Komplek DPR, Senin, lalu.

angket. Masinton juga beberapa kali menyatakan ingin merevisi Undang-Undang KPK dan menjelaskan bahwa alasan pembekuan KPK adalah untuk memperbaiki lembaga antirasuah itu.

Masinton juga pernah mendatangi kantor KPK dengan membawa koper pada 4 September lalu. Ketika itu, Masinton meminta KPK menahan dirinya karena dianggap menghalangi proses hukum yang diusut KPK. "Masinton sulit diatur dan suka bergerak sendiri," ujar sumber ini. Adapun

Bendahara Fraksi PDIP, Alex Indra Lukman, mengatakan masalah kontroversial merupakan persepsi masing-masing. "Dari dulu (kontroversial), dan mediasukameliputnya," katanya.

Alex mengatakan pergantian Masinton ini bertujuan agar fraksinya bersiap memperpanjang masa kerja Panitia Angket KPK. Masa perpanjangan itu nantinya akan dibacakan pada 28 September. "Gambarannya akan diperpanjang, lebih baik bersiap agar Pansus lebih efektif," ujar Alex.

Masa kerja Panitia Angket akan habis pada 28 September ini. Dalam aturan tata tertib DPR, Panitia Angket memiliki waktu 60 hari kerja sejak dibentuk pada 30 Mei lalu. Masa kerja Pansus dihitung sesuai dengan hari kerja. Sedangkan hari libur dan reses tak dihitung. Partai pendukung pemerintah, PDIP, NasDem, Golkar, Hanura, PPP, dan PAN, bergabung dalam Pansus.

Masinton merupakan satu di antara enam anggota Panitia Angket KPK dari PDIP. Selain Masinton, ada Eddy, Risa Mariska,

Arteria Dahlan, Junimart Girsang, dan Adian Napitupulu. PDIP berkali-kali menyebutkan alasan mereka mendukung Pansus adalah ingin melindungi Masinton, yang disebut-sebut menekan saksi kasus korupsi *e-KTP* Miryam S. Haryani. Masinton merupakan satu dari enam anggota Komisi Hukum yang diduga menekan Miryam agar bungkam tidak menyebutkan nama-nama penerima aliran dana dalam kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini.

Adapun Masinton mengatakan pencopotan jabatannya itu merupakan hal yang biasa. Ia menyatakan akan tetap bekerja di dalam Pansus seperti biasa. "Saya masih di Pansus kok," ujarnya.

● ANIDITA RAHMA | DIAS PRASONGKO